

REVITALISASI PERAN MUHAMMADIYAH DALAM BIDANG POLITIK, EKONOMI, DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Faizal¹, Muh Mulawarman JR², M. Amin³

iical5439@mail.com¹, muhmulawarmanjr97@gmail.com², muh.amin@unismuh.ac.id³

Universitas Muhammadiyah Makassar

ABSTRAK

Membahas tantangan dan strategi revitalisasi peran Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modernis dalam menghadapi kompleksitas zaman, khususnya dalam bidang politik, ekonomi, dan pemberdayaan perempuan. Fokus utama penulisan ini terletak pada aktualisasi visi Islam Berkemajuan melalui pengembangan politik nilai yang integratif, kemandirian ekonomi yang berkelanjutan, serta penguatan posisi perempuan sebagai agen perubahan. Dalam konteks disrupsi global, Muhammadiyah dihadapkan pada tantangan polarisasi politik, kesenjangan sosial, dan isu-isu gender yang mendesak. Melalui pendekatan strategis, organisasi ini bertujuan tidak hanya untuk mempertahankan relevansinya, tetapi juga untuk berkontribusi secara nyata terhadap kemaslahatan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan referensi yang berguna bagi akademisi, aktivis sosial, dan masyarakat luas mengenai peran Muhammadiyah dalam menghadapi dinamika kontemporer di Indonesia.

Kata Kunci: Muhammadiyah; Islam Berkemajuan; Gerakan Islam Modernis; Politik Nilai; Kemandirian Ekonomi;.

PENDAHULUAN

Muhammadiyah, sejak didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di Kauman, Yogyakarta, telah mengukuhkan dirinya sebagai gerakan Islam modernis terbesar yang mengusung misi tajdid (pembaruan). Selama lebih dari satu abad, organisasi ini telah memberikan kontribusi nyata bagi bangsa Indonesia melalui "Trilogi Dakwah" tradisionalnya: pendidikan (schooling), kesehatan (healing), dan pelayanan sosial (feeding). Keberhasilan ini telah menempatkan Muhammadiyah sebagai pilar penting dalam pembentukan karakter bangsa. Namun, memasuki dekade ketiga abad ke-21, dunia dihadapkan pada disrupsi besar-besaran yang dipicu oleh revolusi industri 4.0, pergeseran geopolitik global, serta dinamika sosial-keagamaan yang semakin kompleks. Dalam konteks inilah, revitalisasi peran menjadi sebuah keharusan teologis dan sosiologis agar Muhammadiyah tetap relevan sebagai motor penggerak Islam Berkemajuan.

Di bidang politik, tantangan besar muncul dari fenomena polarisasi ekstrem, politik identitas, dan pragmatisme politik yang seringkali mengabaikan etika serta integritas. Muhammadiyah, yang secara khittah (garis perjuangan) menjaga jarak dari politik praktis dan kekuasaan partisan, kini dituntut untuk merevitalisasi peran "Politik Nilai"-nya. Di tengah melemahnya peran civil society, Muhammadiyah harus hadir sebagai kompas moral dan kekuatan penyeimbang yang mampu mengarahkan kebijakan negara demi kemaslahatan publik. Revitalisasi ini mencakup "Jihad Konstitusi"—yakni upaya mengoreksi kebijakan negara yang menyimpang melalui jalur hukum—serta penguatan literasi politik bagi warga persyarikatan agar tidak sekadar menjadi objek suara dalam kontestasi elektoral.

Di bidang ekonomi, Muhammadiyah menghadapi tantangan kesenjangan sosial yang semakin lebar dan dominasi sistem ekonomi kapitalistik yang cenderung eksklusif. Selama ini, kekuatan ekonomi Muhammadiyah banyak terakumulasi dalam Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang bersifat jasa, seperti sekolah dan rumah sakit. Revitalisasi pilar ekonomi—yang sering disebut sebagai pilar ketiga setelah pendidikan dan

kesehatan—menjadi sangat mendesak (fardu kifayah secara organisasi). Muhammadiyah perlu mentransformasi gerakan ekonominya dari sekadar unit pendukung administrasi menjadi kekuatan korporasi umat yang mandiri dan kompetitif. Hal ini melibatkan penguatan jaringan ritel, kedaulatan pangan, serta adopsi teknologi finansial syariah untuk menjawab tantangan ekonomi digital dan mengentaskan kemiskinan di tingkat akar rumput.

Di bidang pemberdayaan perempuan, isu kesetaraan dan peran publik perempuan terus mengalami pergeseran makna di tengah arus feminisme global dan konservatisme agama. Melalui Aisyiyah dan Nasyiatul Aisyiyah, Muhammadiyah sebenarnya telah lama memulai gerakan emansipasi yang islami—jauh sebelum isu kesetaraan gender menjadi arus utama. Namun, revitalisasi di bidang ini tetap diperlukan untuk menjawab tantangan kontemporer yang kian nyata, seperti meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, tantangan kesehatan reproduksi (stunting), hingga perlunya kepemimpinan perempuan dalam ranah kebijakan strategis. Muhammadiyah harus mampu memformulasikan model pemberdayaan yang menyeimbangkan antara peran domestik (ketahanan keluarga) dan peran publik (kepemimpinan) tanpa kehilangan jati diri keislamannya.

Secara keseluruhan, revitalisasi di ketiga bidang ini bukan sekadar upaya administratif atau manajerial organisasi, melainkan sebuah gerakan ideologis untuk menerjemahkan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah ke dalam aksi nyata yang transformatif. Muhammadiyah harus mampu membuktikan bahwa Islam Berkemajuan bukan sekadar jargon retorik, melainkan solusi konkret atas problem keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal di masa depan. Berdasarkan urgensi dan kompleksitas masalah tersebut, makalah ini disusun untuk membedah strategi, model gerakan, dan langkah taktis Muhammadiyah dalam melakukan revitalisasi di bidang politik, ekonomi, dan pemberdayaan perempuan..

METODE

menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi literatur yang mencakup buku, artikel jurnal, dan dokumen resmi terkait Muhammadiyah dan gerakan sosial keagamaan di Indonesia. Selain itu, wawancara dengan beberapa tokoh Muhammadiyah dan aktivis di bidang politik, ekonomi, dan pemberdayaan perempuan juga dilakukan untuk mendapatkan perspektif langsung tentang tantangan dan langkah-langkah strategis yang diambil oleh organisasi ini. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi isu-isu kunci serta solusi yang relevan dengan konteks zaman saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa revitalisasi peran Muhammadiyah dalam tiga bidang utama politik, ekonomi, dan pemberdayaan Perempuan dapat dijabarkan sebagai berikut:

Politik: Muhammadiyah berhasil menetapkan "politik nilai" sebagai kompas moral, menekankan perlunya akuntabilitas dan transparansi dalam proses politik. Melalui pendidikan politik dan distribusi kader berkualitas di ranah publik, organisasi ini memperkuat posisinya sebagai penyeimbang dalam sistem demokrasi Indonesia.

Ekonomi: Revitalisasi sektor ekonomi Muhammadiyah menunjukkan keberhasilan dalam menciptakan model pemberdayaan ekonomi yang berbasis pada solidaritas. Upaya untuk mengintegrasikan unit-unit usaha di bawah satu holding company memperkuat kemandirian finansial dan memaksimalkan potensi ekonomi komunitas.

Pemberdayaan Perempuan: Peran Aisyiyah dalam pemberdayaan perempuan terlihat melalui pengembangan model kepemimpinan inklusif dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan wirausaha menjadi faktor kunci dalam meningkatkan status sosial dan ekonomi mereka.

Pembahasan

Revitalisasi Peran Muhammadiyah

Revitalisasi peran Muhammadiyah dalam bidang politik diarahkan pada penguatan "politik nilai" (high politics) yang menempatkan organisasi sebagai kekuatan moral dan penyeimbang demokrasi. Muhammadiyah secara konsisten menjaga jarak dengan politik praktis agar tidak terjebak dalam kepentingan kekuasaan partisan, namun tetap aktif dalam melakukan "Jihad Konstitusi" untuk mengawal kebijakan negara agar tetap selaras dengan cita-cita kemerdekaan. Melalui strategi ini, Muhammadiyah mendistribusikan kader-kader berkompeten ke ranah publik dengan bekal integritas tinggi, sekaligus melakukan edukasi politik bagi warga persyarikatan agar menjadi pemilih yang cerdas dan kritis terhadap praktik politik transaksional yang merusak tatanan bangsa.

Dalam khazanah pemikiran Muhammadiyah, politik tidak dipandang sebagai upaya perebutan kekuasaan pragmatis, melainkan sebagai instrumen dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Di tengah dinamika demokrasi Indonesia yang kian terjebak dalam transaksionalisme, Muhammadiyah memerlukan strategi revitalisasi yang menempatkan "Politik Nilai" sebagai panglima.

Berikut adalah strategi revitalisasi yang dapat diimplementasikan:

1. Penguatan "High Politics" (Politik Organisasi)

Muhammadiyah harus tetap konsisten pada Khittah (garis perjuangan) untuk tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Strateginya adalah:

- a. Jihad Konstitusi: Muhammadiyah melakukan peran politik melalui jalur hukum dengan menguji undang-undang (judicial review) yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, terutama kebijakan yang mengancam kedaulatan negara dan hajat hidup orang banyak.
- b. Kompas Moral Bangsa: Muhammadiyah bertindak sebagai wasit moral yang memberikan pernyataan sikap yang tegas, jernih, dan independen terhadap isu-isu kebangsaan, seperti korupsi, ketidakadilan hukum, dan pelanggaran HAM.

2. Distribusi Kader di Ruang Publik (Dakwah Struktural)

Meskipun Muhammadiyah bukan partai politik, Muhammadiyah perlu melakukan "proyeksi kader" ke berbagai lini pemerintahan tanpa harus membawa atribut organisasi secara partisan.

- a. Diaspora Kader: Mendorong kader-kader terbaik yang memiliki integritas dan kompetensi untuk mengisi jabatan strategis di lembaga negara (KPU, KPK, MK, birokrasi, dsb).
- b. Etika Jabatan: Kader yang berada di ranah politik praktis harus dibekali dengan etika kepemimpinan Muhammadiyah agar menjadi pembeda di tengah arus korupsi. Mereka adalah duta Muhammadiyah yang bertugas mewarnai kebijakan dengan nilai Islam Berkemajuan.

3. Pendidikan Politik untuk Basis Akar Rumput

Revitalisasi harus menyentuh warga persyarikatan di tingkat ranting agar tidak mudah terfragmentasi saat musim pemilihan umum (Pemilu).

- a. Literasi Pemilih Cerdas: Mengedukasi warga agar menjadi pemilih rasional yang berbasis pada rekam jejak dan visi-misi kandidat, bukan karena politik uang (money politics).
- b. Penyadaran Kewargaan (Civic Education): Menanamkan pemahaman bahwa

berpolitik adalah ibadah untuk kemaslahatan publik, sehingga partisipasi politik harus dilandasi tanggung jawab moral kepada Tuhan dan Bangsa.

4. Menjadi Mediator dan Pemersatu Bangsa

Di tengah ancaman polarisasi politik yang tajam, Muhammadiyah merevitalisasi perannya sebagai "Rumah Besar Bangsa".

- a. Moderasi Politik: Mengedepankan sikap moderat (wasathiyah) yang merangkul semua golongan. Muhammadiyah harus menjadi jembatan dialog antarkelompok yang berseteru untuk menjaga integrasi nasional.
- b. Keadilan Sosial sebagai Agenda Politik: Fokus utama politik nilai Muhammadiyah adalah memperjuangkan hak-hak rakyat kecil yang terpinggirkan oleh kebijakan ekonomi-politik yang tidak adil.
- c. Analisis: Revitalisasi politik ini bertujuan untuk memastikan bahwa Muhammadiyah tetap memiliki daya tawar (bargaining power) yang tinggi di hadapan kekuasaan tanpa harus kehilangan independensinya. Dengan politik nilai, Muhammadiyah tidak mengejar jabatan, tetapi mengejar tegaknya nilai-nilai kebenaran dalam kebijakan negara.

Langkah Taktis Penguatan Ekonomi Muhammadiyah

Untuk memperkuat pilar ekonomi sebagai "Pilar Ketiga" di era digital, Muhammadiyah perlu melampaui model bisnis konvensional dan bergerak menuju ekosistem ekonomi yang terintegrasi. Berikut adalah langkah-langkah taktis yang dapat diambil:

1. Konsolidasi dan Korporatisasi Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) Muhammadiyah memiliki ribuan unit usaha di bidang pendidikan dan kesehatan yang memiliki daya beli luar biasa. Langkah taktisnya adalah melakukan internal market consolidation.
2. Akselerasi Digitalisasi UMKM dan Logistik Di era digital, kehadiran fisik tidak lagi cukup. Muhammadiyah harus membangun platform marketplace atau e-commerce khusus yang menghubungkan produk-produk warga persyarikatan (UMKM) dengan pasar nasional. Langkah ini harus dibarengi dengan pengembangan sistem logistik mandiri yang efisien. Contoh nyata adalah penguatan jaringan ritel seperti Logmart yang diintegrasikan dengan aplikasi pemesanan digital, sehingga menciptakan rantai pasok yang tidak terputus dari produsen warga hingga ke konsumen.
3. Pengembangan Financial Technology (FinTech) Syariah Kemandirian umat sulit tercapai tanpa kedaulatan finansial. Muhammadiyah perlu mengonversi lembaga keuangan mikronya, seperti Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM), ke dalam sistem digital. Dengan meluncurkan aplikasi mobile banking atau dompet digital (e-wallet) khusus warga Muhammadiyah, organisasi dapat mengelola perputaran uang (zakat, infak, maupun investasi bisnis) secara lebih transparan, cepat, dan akuntabel guna membiayai proyek-proyek strategis umat.
4. Hilirisasi Ekonomi Berbasis Ketahanan Pangan Menghadapi tantangan global, Muhammadiyah harus masuk ke sektor hulu dan hilir pangan. Langkah taktisnya adalah dengan mengelola lahan-lahan wakaf yang menganggur untuk menjadi lahan pertanian produktif menggunakan teknologi smart farming. Hasil panen tersebut kemudian diolah melalui industri pengolahan milik sendiri dan didistribusikan melalui jaringan ritel Muhammadiyah. Ini tidak hanya menciptakan kemandirian ekonomi, tetapi juga solusi atas kedaulatan pangan nasional.
5. Inkubasi Bisnis untuk Kader Milenial dan Gen Z Muhammadiyah perlu mendirikan Muhammadiyah Techno-Park atau pusat inkubasi startup bagi kader muda. Langkah ini bertujuan untuk mencetak entrepreneur baru yang melek teknologi. Dengan memberikan pendampingan bisnis, akses modal, dan jejaring pasar, Muhammadiyah

dapat memastikan bahwa revitalisasi ekonomi memiliki keberlanjutan regenerasi yang adaptif terhadap perubahan teknologi di masa depan.

Model pemberdayaan perempuan dalam Muhammadiyah

Model pemberdayaan perempuan dalam Muhammadiyah, yang dipelopori oleh Aisyiyah, berakar pada ideologi Islam Berkemajuan. Model ini memandang bahwa perempuan bukan sekadar pelengkap, melainkan subjek aktif dalam memajukan peradaban tanpa harus meninggalkan identitas keimanannya.

Berikut adalah uraian mengenai model pemberdayaan tersebut dalam menjawab tantangan kontemporer:

1. Model Kepemimpinan Transformatif dan Inklusif

Aisyiyah merevitalisasi peran perempuan dengan mendorong mereka keluar dari ranah domestik menuju ranah publik-strategis. Dalam model ini, perempuan diberikan akses luas untuk menjadi pemimpin di berbagai lembaga, mulai dari rektor universitas, direktur rumah sakit, hingga pimpinan di lembaga zakat dan politik nilai. Strateginya adalah membuktikan bahwa kepemimpinan perempuan tidak bertentangan dengan syariat, melainkan manifestasi dari tugas khalifah fil ardh (wakil Tuhan di bumi) untuk memakmurkan dunia.

2. Penguatan Ketahanan Keluarga sebagai Basis Peradaban

Menghadapi tantangan arus individualisme dan disrupsi sosial, Muhammadiyah mengembangkan model Keluarga Sakinah Berkemajuan. Model ini tidak hanya fokus pada aspek spiritual, tetapi juga aspek kesehatan dan psikologis.

- a. Isu Kontemporer: Penanganan stunting dan kesehatan reproduksi.
- b. Langkah Nyata: Aisyiyah menggunakan jaringan akar rumputnya (melalui program Bina Keluarga Balita) untuk melakukan edukasi gizi dan kesehatan ibu, yang menjadi kunci dalam mencetak generasi berkualitas di masa depan.

3. Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Komunitas (BUEKA)

Untuk menjawab tantangan kemiskinan dan ketergantungan finansial, Muhammadiyah melalui program Bina Usaha Ekonomi Keluarga Aisyiyah (BUEKA) mengembangkan model pemberdayaan ekonomi kolektif.

- a. Strategi: Perempuan di tingkat ranting (desa) dikelompokkan untuk mendapatkan pelatihan kewirausahaan, akses modal syariah, dan literasi keuangan digital.
- b. Dampak: Model ini menciptakan kemandirian ekonomi perempuan yang pada gilirannya memperkuat ketahanan ekonomi keluarga tanpa mengabaikan peran mereka sebagai pendidik utama dalam rumah tangga.

4. Advokasi dan Perlindungan Sosial Progresif

Menghadapi isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, Muhammadiyah merevitalisasi peran lembaga hukumnya. Model yang diambil adalah Dakwah Advokasi, di mana Aisyiyah menyediakan pusat layanan pengaduan dan bantuan hukum bagi korban kekerasan. Model ini sangat progresif karena menggabungkan pendekatan hukum formal dengan pendampingan psikososial dan spiritual, memastikan korban mendapatkan keadilan sekaligus pemulihan mental.

5. Digitalisasi Dakwah dan Literasi Media

Dalam menjawab tantangan era informasi, perempuan Muhammadiyah didorong untuk melek teknologi. Model pemberdayaannya mencakup pelatihan literasi media agar perempuan mampu menyaring informasi (tabayyun) dan menggunakan media sosial sebagai sarana dakwah yang menyejukkan. Hal ini penting untuk membentengi keluarga dari paparan paham ekstremis maupun budaya luar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Model pemberdayaan perempuan Muhammadiyah bersifat Integratif-Komprehensif.

Ia tidak memisahkan antara peran publik dan privat, melainkan menyatukannya dalam bingkai ibadah. Dengan jati diri Islam Berkemajuan, perempuan Muhammadiyah mampu menjadi modern tanpa kehilangan akar agamanya, dan menjadi religius tanpa harus terbelakang secara intelektual maupun sosial.

Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung Revitalisasi

Proses transformasi Muhammadiyah di bidang politik, ekonomi, dan pemberdayaan perempuan tidak terlepas dari berbagai variabel yang dapat mempercepat atau justru memperlambat gerak organisasi.

1. Faktor Pendukung (Enabling Factors)

- a. **Infrastruktur Organisasi yang Masif:** Muhammadiyah memiliki jaringan vertikal dari tingkat Pusat hingga Ranting (desa) serta jaringan horizontal melalui berbagai Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). Infrastruktur ini memudahkan mobilisasi gagasan dan eksekusi program revitalisasi secara serentak.
- b. **Kemandirian Finansial dan Ideologis:** Sebagai organisasi yang terbiasa mandiri ("tangan di atas"), Muhammadiyah memiliki ketahanan terhadap intervensi eksternal. Hal ini memudahkan Muhammadiyah untuk tetap konsisten pada jalur politik nilai dan pengembangan ekonomi tanpa ketergantungan pada pihak lain.
- c. **Sumber Daya Manusia (SDM) Terdidik:** Melalui ribuan sekolah dan ratusan perguruan tinggi, Muhammadiyah memiliki suplai kader intelektual yang melimpah. Para pakar di berbagai bidang ini merupakan mesin utama dalam merumuskan strategi ekonomi digital dan kebijakan publik yang berbasis sains.
- d. **Legitimasi Historis dan Publik:** Kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap kredibilitas Muhammadiyah dalam mengelola institusi publik (RS dan Sekolah) menjadi modal sosial yang kuat untuk memperluas ekspansi ke pilar ekonomi dan advokasi perempuan.

2. Faktor Penghambat (Inhibiting Factors)

- a. **Inersia Birokrasi Organisasi:** Sebagai organisasi besar yang sudah berusia lebih dari satu abad, Muhammadiyah terkadang mengalami kekakuan birokrasi. Kecepatan dalam mengambil keputusan seringkali kalah dengan dinamika perubahan zaman yang sangat cepat, terutama di era disrupsi digital.
- b. **Kesenjangan Antar Wilayah:** Terdapat ketimpangan kapasitas antara pengurus di perkotaan dengan di daerah terpencil. Revitalisasi seringkali hanya berjalan cepat di pusat-pusat kota atau wilayah maju, sementara di tingkat akar rumput (Ranting) masih terkendala pemahaman visi dan teknologi.
- c. **Pragmatisme Politik Global dan Lokal:** Tarikan politik praktis yang sangat kuat seringkali memicu faksionalisme di internal kader. Hal ini dapat mengaburkan fokus organisasi pada politik nilai dan menyebabkan energi organisasi habis untuk urusan kontestasi elektoral jangka pendek.
- d. **Budaya Kerja yang Masih Sektoral:** Di bidang ekonomi, masih terdapat kecenderungan "egosektoral" di mana antar-AUM (misalnya antar universitas atau antar rumah sakit) belum sepenuhnya bersinergi dalam satu ekosistem ekonomi kolektif, sehingga potensi ekonomi yang besar belum teragregasi secara maksimal.

Untuk meminimalisir penghambat tersebut, Muhammadiyah perlu melakukan Transformasi Digital Manajerial untuk mempercepat birokrasi dan Intensifikasi Perkaderan yang lebih inklusif bagi generasi milenial dan Gen Z. Dengan demikian, visi revitalisasi tidak hanya berhenti sebagai dokumen di tingkat pusat, tetapi menjadi gerakan nyata hingga ke tingkat ranting.

KESIMPULAN

Revitalisasi peran Muhammadiyah dalam bidang politik, ekonomi, dan pemberdayaan perempuan merupakan manifestasi nyata dari ideologi Islam Berkemajuan yang adaptif terhadap tantangan zaman. Muhammadiyah berhasil mengukuhkan politik nilai sebagai kompas moral bangsa, mentransformasi Amal Usaha ke arah korporatisasi ekonomi untuk kemandirian umat, serta memperkuat peran perempuan melalui Aisyiyah sebagai subjek penggerak peradaban yang mampu menyeimbangkan peran domestik dan publik. Keberhasilan revitalisasi ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah tidak hanya bertahan sebagai organisasi keagamaan tradisional, tetapi terus berevolusi menjadi kekuatan masyarakat sipil yang modern, mandiri, dan inklusif dalam menjawab persoalan kemanusiaan dan kebangsaan di era disrupsi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, S. (2010). *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi Ijtihad dalam Pandangan Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Azra, A. (2002). *Reposisi Muhammadiyah dalam Dinamika Bangsa*. Jakarta: PSAP Muhammadiyah.
- Jainuri, A. (2002). *Ideologi Politik Muhammadiyah*. Surabaya: LPAM.
- Mu'ti, A. (2015). *Islam Berkemajuan: Kiai Dahlan, Gejala Modernisme, dan Strategi Dakwah Muhammadiyah*. Jakarta: Al-Wasat.
- Nashir, H. (2014). *Memahami Ideologi Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Nashir, H. (2015). *Muhammadiyah Abad Kedua*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pimpinan Pusat Aisyiyah. (2022). *Manhaj Gerakan Perempuan Berkemajuan: Keputusan Mukhtar Aisyiyah ke-48*. Yogyakarta: PP Aisyiyah.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2005). *Khittah Perjuangan Muhammadiyah dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Khittah Denpasar)*. Yogyakarta.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2022). *Risalah Islam Berkemajuan: Keputusan Mukhtar Muhammadiyah ke-48*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Suratno, dkk. (2021). *Ekonomi Muhammadiyah: Membangun Pilar Ketiga*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.